KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Oleh : *Nadia Rachel Dwinanda Shasri*

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jalan Pala No. 3 Pekanbaru

Email : Nadiarahel1203@gmail.com- Telepon : 081268811794

ABSTRACT

Pornography is a crime that is privacy in violation of Human Rights (HAM), especially the rights of children (right of child). Required application of criminal law policies so that the legal protection of children as victims of criminal acts of pornography can be implemented properly.

This type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data. The legal principle that is used is the principle of justice regarding criminal law policies against children as victims of pornography that affects positive law in Indonesia.

The results of this study are criminal law policies against children as victims of criminal acts of pornography, there must be a renewal of criminal law by applying the principle of restorative justice to children as victims of fair treatment and for perpetrators to be carried out rehabilitation of lawbreakers aimed not at retaliation. Legal protection applied to children as victims of pornography is still unable to accommodate the interests of children as victims. Legal protection given to children as victims must be able to restore the welfare of children as victims, be able to repair the damage that occurs both in terms of physical and psychological children as victims, and require the offender to contribute to the improvement by giving victims the right to receive compensation and restitution and protect it from being a victim again.

Keywords: Criminal Law Policy - Children - Victims - Pornography

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hukum sebagai kaidah normatif, menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yakni bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.²

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat guna mengantisipasi pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi.³ Khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini teknologi telah berkembang dengan pesat dan semakin canggih. Di dalam era perkembangan teknologi ini, hukum dapat menjadi dasar dan sekaligus arah agar perkembangan teknologi tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknologi juga telah menjadi bagian tak terlepaskan dari segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam kemajuan teknologi ini

mempermudah akses menuju era digitalisasi. Teknologi yang semakin canggih ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak juga yang menggunakan kecanggihan dan kehebatan teknologi ini untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang menimbulkan ancaman bagi pengguna teknologi lainnya. Misalnya di dalam hal pemanfaatan ruang maya atau internet.⁴

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya akses terhadap internet, dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan penggalian informasi tanpa batas. Saat ini internet telah terintegrasi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat menggunakan internet. Hal ini yang kemudian tidak hanya menimbulkan manfaat akan tetapi juga mengancam keamanan maupun hak asasi pengguna internet. Namun pemanfaatan kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan pornografi melalui internet.

Kurangnya pemahaman anak-anak mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang *cyber* membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui konten-konten pornografi yang tersedia

¹Syaiful Bakhti, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 2.

³Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial, *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 2, 2017, Hlm. 264.

⁴Atem, Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak-Anak, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol.1 No.2, 2016, hlm. 108.

luas di ruang *cyber* seperti pergaulan mengarah ke seks bebas, kemudian berbagi atau bertukar foto pribadi yang seksi. Selanjutnya fotonya disebarluaskan oleh teman atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diketahui bahwa jumlah kasus pornografi yang melibatkan anak sebagai korban mengalami peningkatan setiap tahunnya. KPAI telah selesai melakukan pendataan mengenai jumlah kasus pornografi yang melibatkan anak sampai dengan tahun 2018.

Jumlah kasus pornografi yang menjerat anak-anak sebagai korban mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebanyak 322 kasus, tahun 2015 sebanyak 463 kasus, tahun 2016 sebanyak 587 kasus, tahun 2017 sebanyak 608 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 679 kasus.⁵ Meningkatnya jumlah kasus pornografi yang menjerat anak-anak sebagai korban ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan *cyber* di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak-anak sebagai korban.

Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban memiliki dampak jangka panjang bagi anak. Terlepas apakah orang yang menciptakan

pornografi itu di adili, ketika gambar porno telah menjadi milik publik, kemungkinan besar gambar tersebut akan terus disebarluaskan dan ini akan mengantui kehidupan anak tersebut selamanya. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban diatur di dalam ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia. Berdasarkan dalam konteks hukum positif, konsep tentang pornografi dapat juga ditemukan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam KUHP misalnya, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai definisi pornografi tersebut. Batasan pengertian pornografi dalam KUHP hanyalah disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Namun apabila dilihat dari bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut, maka kesemuanya termasuk dalam kategori pornografi. Walaupun demikian berdasarkan pada pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesopanan atau kesusilaan menunjukkan dalam KUHP tidak terdapat adanya legalisasi yang mengatur masalah pornografi.⁶

⁵<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-dunia-maya-capai-679-kasus>, diakses, tanggal, 26 Agustus 2019.

⁶Andri Winjaya Laksana Suratman, "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 1 No. 2 Agustus 2014, hlm. 171.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi?
2. Bagaimanakah gagasan ideal kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang relatif dekat dengan publik. Di sisi lain, masyarakat juga sering bersikap reaktif dengan menginginkan jenis pidana tertentu untuk dijatuhkan kepada pelaku pidana, terlebih jika korbannya salah satu anggota masyarakat tersebut.⁷

Istilah *criminal policy* yang dipergunakan oleh Hoefnagels bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kebijakan kriminal. Istilah ini agaknya kurang pas karena seolah-olah mencari suatu kebijakan untuk membuat kejahatan (kriminal). Istilah ini lebih tepat digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan.⁸

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*)

⁷Eva Achjani Zulfa, dkk *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Permasalahan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

⁸Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 51.

hukum. Undang-Undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁹

2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.¹⁰

Pendapat John Rawls mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata

lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the*

⁹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

¹⁰Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 2004, hlm. 81-86.

¹¹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246.

principle of fair equality of opportunity).

3. Konsep Perlindungan Hak Anak

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu konvensi tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa:¹²

- a) Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
- b) Meyakini bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya, terutama anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa, sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
- c) Mengakui bahwa anak untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana

¹²Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 110.

kebahagiaan, cinta dan pengertian.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³

Asas perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi:14

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

¹³Jaap E. Doek, "Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/#>, pada tanggal 20 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁴Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 37.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).¹⁵
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶
3. Pornografi adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video.¹⁷
4. Anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁸
5. Pornografi anak adalah setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara

nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.¹⁹

6. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁰
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada asas-asas dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif

¹⁵Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 390.

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm,50

¹⁷Harrys Pratama Teguh, *op.cit*, hlm. 428.

¹⁸Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm.49.

¹⁹Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, akarta, 2016, hlm. 125.

²⁰Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm. 63.

²¹Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tertulis.²² Asas hukum yang digunakan adalah asas keadilan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi yang yang mempengaruhi hukum positif di Indonesia.

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³

2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

6. Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁴ Bahan

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

²³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

²⁴Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- c) Bahan Hukum Tersier
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.²⁵

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

Pornografi adalah grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan

sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata.²⁶ Tujuan hukum pornografi menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa tujuan hukum pornografi antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;

²⁵Ibid. hlm. 66.

²⁶Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1997, hlm. 9.

- c) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, dan sosial.²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang meliputi: perlindungan di bidang agama,

kesehatan, pendidikan, sosial, dan khusus.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dan *Cybercrime*

Anak korban pornografi didefinisikan sebagai adanya tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain. Menampilkan dan/atau menayangkan kepada public suatu adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

²⁸Harrys Pratama Teguh, *op.cit.*, hlm. 19.

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Tindak Pidana Pornografi

Kebijakan hukum pidana sangat diperlukan di dalam mengatur tatanan hidup masyarakat agar dapat berjalan dinamis khususnya pada era globalisasi yang semakin berkembang teknologinya. Teknologi yang berkembang ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi internet. Keuntungan yang diperoleh melalui internet, ada juga kerugian yang perlu dihindari, salah satunya adalah pornografi. Anak-anak paling beresiko ketika mereka berulang kali terpapar gambar yang berlebihan dan berpotensi adiktif. Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberikan efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika bagi kehidupan.²⁹ Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Gagasan Ideal Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: "Anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga".

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa rehabilitasi medis yang dimaksud adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Selain hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pornografi yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, bantuan rehabilitasi. Psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada anak sebagai

²⁹Ridwan Sanjaya, *op.cit*, hlm. 4

korban tindak pidana pornografi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan anak sebagai korban tindak pidana pornografi.

Perlu adanya suatu gagasan ideal kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi karena perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi di dalam hukum positif di Indonesia saat ini belum dapat mengakomodir seluruh kepentingan anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi. Hal ini disebabkan karena hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang hukuman pidana penjara dan denda bagi pelaku. Sedangkan hukuman pembayaran denda bagi pelaku masuk ke dalam kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa denda yang masuk ke kas negara tersebut tidak dapat mengakomodir kepentingan anak sebagai korban tindak pidana pornografi dan hanya mengakomodir kepentingan negara saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang melibatkan anak ini mengalami perkembangan di dalam melengkapi peraturan perundang-undangan sebelumnya. Juga memiliki kelemahan yang terlihat dari penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku berupa ancaman pidana penjara dan denda. Sedangkan, kebijakan untuk melakukan restitusi dari pelaku terhadap korban tidak terlaksana dengan baik.

2. Kebijakan hukum yang diterapkan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi masih belum dapat mengakomodir kepentingan anak sebagai korban. Kebijakan hukum pidana yang diberikan kepada anak sebagai korban harus dapat mengembalikan kesejahteraan anak sebagai korban, dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi baik dari segi fisik maupun psikis anak sebagai korban, dan mewajibkan pelaku untuk turut menyumbang guna atas perbaikan tersebut dengan memberikan kepada korban hak menerima kompensasi dan restitusi serta melindunginya dari menjadi korban kembali. Maka dari itu perlu adanya gagasan ideal kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi.

B. Saran

1. Diperlukannya pembaharuan hukum pidana dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia, agar prinsip *restorative justice* dapat meresap ke dalam rasa keadilan hukum secara lebih berarti, dan rasa keadilan hukum akan lebih secara sah meresap untuk membatasi rasa keadilan masyarakat.
2. Perlunya memperluas tujuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dari yang tradisional dengan pendekatan *offender centered* untuk mencegah warga masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desafuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gosita, Arief, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1997, *Pornografi dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sanjaya, Ridwan, 2010, *Parenting Untuk Pornografi di Internet*,

Elex Media
Computerindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Suseno, Franz Magnis, 2004, *Etika Politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.

Teguh, Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Zulfa, Eva Achjani, dan Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Permasayarakatan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

B. Jurnal

Andri Winjaya Laksana Suratman, 2014, "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Agustus.

Dadin Eka Saputra, 2017, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial", *Jurnal Al'Adl*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Vol. IX, No. 2 Agustus.

Jaap E. Doek, "Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/#>, pada tanggal 20 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

D. Website

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-dunia-maya-capai-679-kasus>, Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2019.